

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SAKTI PADA PELAYANAN BENDAHARA SATUAN (BENSAT) POLRES BARITO TIMUR

Al Munawarah¹, Munawarah², Irza Setiawan³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: itsmunnaaa2401@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari fenomena yang terjadi, seperti kurangnya pelatihan, seringnya maintenance, dan kurangnya SDM. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dan faktor penghambat serta pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan reduksi data, menampilkan data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Efektivitas Penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur telah efektif. Pertama, Aspek tugas dan fungsi belum semuanya efektif, karena; a) Aturan dan pelaksanaan tugas kurang efektif. b) Pembagian tugas kurang efektif. c) Koordinasi efektif. d) Disiplin petugas efektif. Kedua, Aspek rencana atau program efektif, karena; a) Perencanaan efektif. b) Perencanaan target efektif. Ketiga, Aspek ketentuan dan peraturan efektif, karena; a) Ketentuan terhadap aturan efektif. b) Kejelasan aturan efektif. Keempat, Aspek tujuan yang ideal efektif, karena; a) Target yang dicapai efektif. b) Kesesuaian efektif. 2) Faktor penghambatnya, meliputi; a) Kurangnya pelatihan. b) Seringnya maintenance. c) Kurangnya SDM. 3) Faktor pendorongnya, meliputi; a) Aspek rencana atau program efektif. b) Aspek ketentuan dan peraturan efektif. c) Aspek tujuan yang ideal efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Aplikasi SAKTI, dan Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT).

ABSTRACT

This research started from phenomena that occurred, such as lack of training, frequent maintenance, and lack of human resources. Therefore, the aim of this research is to determine the effectiveness of using the SAKTI application in the East Barito Police Unit Treasurer Service (BENSAT) and the inhibiting and encouraging factors. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Data processing and data analysis techniques use data reduction, data display, and data verification. The results of this research show that; 1) The effectiveness of using the SAKTI application in the East Barito Police Unit Treasurer Service (BENSAT) has been effective. First, aspects of duties and functions are not all effective, because; a) Rules and implementation of tasks are less effective. b) The division of tasks is less effective. c) Effective coordination. d) Officer discipline is effective. Second, the plan or program aspect is effective, because; a) Effective planning. b) Effective target planning. Third, the aspects of rules and regulations are effective, because; a) Provisions for effective rules. b) Clarity of effective rules. Fourth, the ideal goal aspect is effective, because; a) The targets achieved are effective. b) Effective conformity. 2) Inhibiting factors include; a) Lack of training. b) Frequent maintenance. c) Lack of human resources. 3) The driving factors include; a) Aspects of an effective plan or program. b) Aspects of effective rules and regulations. c) The ideal aspect of the goal is effective.

Keywords: Efektivitas, Aplikasi SAKTI, dan Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT).

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini semakin banyak tuntutan yang tidak dapat dihindari khususnya tuntutan dalam kemajuan ekonomi. Tuntutan dalam era globalisasi ini memang sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, karena dalam memajukan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan swasta ataupun investor asing akan tetapi, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kemajuan ekonomi di suatu negara (Said, 2018). Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk menciptakan tingkat kemajuan ekonomi

yang signifikan. Semua aktivitas yang terjadi didalam sebuah instansi pemerintahan menjadi perhatian penting terutama dalam kegiatan pengelolaan keuangan di dalamnya.

Setiap kegiatan pengelolaan keuangan pasti memerlukan sistem akuntansi di dalamnya dan bukan hanya perusahaan saja, akan tetapi pemerintah juga memiliki sistem akuntansinya sendiri. Tujuan penggunaan sistem akuntansi pemerintahan berbeda dengan perusahaan pada umumnya, karena Instansi Pemerintahan di sini tidak menggunakan sistem akuntansi untuk memperhitungan keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh, akan tetapi sistem akuntansi di dalam sebuah Instansi Pemerintahan diharapkan dapat menjadi pengatur dan pengendali seluruh kegiatan pengelolaan keuangan. Sistem akuntansi di dalam Instansi Pemerintahan diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu alat sistem akuntansi yang digunakan juga akan semakin canggih. Tidak hanya untuk perusahaan asing atau swasta, namun juga untuk sektor pemerintahan. Dalam era ini sistem akuntansi sudah maju dengan sangat pesat, salah satu yang sering ditemui yaitu sistem akuntansi berbasis aplikasi ataupun web yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun hanya dengan bantuan internet (Prajanto and Pratiwi, 2019). Sebagai suatu upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dimasa kini, semua proses pengelolaan keuangan, pencairan dana, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, penyimpanan dan pencatatan atas pengelolaan keuangan negara sudah tidak lagi dilakukan secara manual, akan tetapi dalam era ini semua sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis aplikasi.

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu konsep yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya (Mubarok, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas disuatu Instansi Pemerintah memang sudah semestinya dilakukan. Pemerintah dituntut harus bisa mewujudkan tata kelola yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan dengan adanya sistem akuntansi berbasis aplikasi yang semakin canggih dalam era ini akan mempermudah pengelola anggaran di pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 berbunyi bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan juga tidak lepas dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya mengelola keuangan negara dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi informasi yang canggih dapat mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh setiap instansi khususnya di Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak. Pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan dalam mengelola pengeluaran kas sebagai komponen sumber daya yang sangat penting. Sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan negara, pengeluaran kas harus dikelola sesuai dengan kebutuhan untuk mendorong kemajuan ekonomi dengan tidak melupakan aturan aturan yang berlaku. Pengeluaran kas merupakan serangkaian pengelolaan aktivitas pengeluaran berupa uang tunai maupun cek yang digunakan untuk kegiatan perusahaan.

Penggunaan pengeluaran kas negara memiliki mekanisme dan sistem terdiri dari 4 sistem yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan Pembayaran Langsung (LS) (Fauziah, Manossoh and Kindangen, 2023). Setiap mekanisme dan sistem yang dipakai dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pengeluaran kas digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional di dalam lingkup satuan kerja yang sifatnya situasional. Pada beberapa kegiatan, seperti kegiatan dalam pengadaan barang/jasa yang memerlukan pengeluaran kas yang cukup besar diperlukan keselarasan rencana pencairan dana. Hal ini dilakukan agar setiap pengeluaran kas khususnya pengeluaran kas dengan jumlah besar diperlukan perencanaan yang matang serta menjadwalkan pengeluaran untuk menjamin tingkat akurasi dalam pengeluaran kas negara.

Setiap pengeluaran kas yang terjadi akan berpengaruh pada proses penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di setiap Instansi Pemerintah. Penyerapan anggaran sendiri

berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta dapat meratakan pendapatan (Andriyani, 2012). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan pemerintah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran negara sehingga terjadi keseimbangan yang dinamis. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu bentuk wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan berpedoman pada undang-undang (Lestari, Bagia and Jana, 2018). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan suatu Instansi Pemerintah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam hal ini penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikatakan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembangunan suatu negara.

Penyerapan anggaran dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi sumber daya manusia dan juga komitmen dari organisasi itu sendiri. Dalam kata lain untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik dan dengan dibutuhkannya sumber daya manusia (Mubarok and Hidayah, 2024) serta adanya mekanisme dan sistem pengeluaran kas, diperlukan seorang bendahara guna membantu pengelolaan keuangan negara di setiap satuan kerja yang ada di Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016) Nomor 73/PMK.05/2008 yang disebut bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Bendahara pengeluaran bertugas untuk mengelola keuangan negara terutama dalam hal pengeluaran kas yang menjadi poin penting dalam penyerapan anggaran, karena seringkali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dalam waktu yang singkat. Dalam prosesnya bendahara pengeluaran akan melakukan pencairan sejumlah uang sesuai dengan rencana kegiatan yang telah diajukan. Akan tetapi dalam proses pengelolaan keuangan negara tidak cukup sampai dipengeluaran kas saja dan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pengeluaran uang kas negara dibutuhkan dokumen atau surat pertanggungjawaban yang nantinya akan digunakan sebagai bukti transaksi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

Bendahara pengeluaran wajib melakukan penyelenggaraan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban terhadap seluruh penerimaan serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Nikita, 2016).

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) resmi diputuskan untuk digunakan di setiap satuan kerja yang ada di Instansi Pemerintah tepatnya di Tahun 2022 termasuk di Satuan Kerja Polres Barito Timur dan dengan munculnya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), maka aplikasi yang ada di satuan kerja akan mengalami perubahan yang signifikan. Terlebih Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini didesain untuk dapat berintegrasi dari beberapa aplikasi sebelumnya.

Keberadaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai pengganti sistem aplikasi yang sudah ada akan menuntut manajemen untuk membuat strategi baru karena perlunya adaptasi dengan pola baru dalam penyelesaian pekerjaan, karena sebagai sebuah sistem baru, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) memiliki resiko kegagalan dalam penerapannya. Sebagai sebuah sistem baru dalam pengelolaan kas negara, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) akan menghadirkan berbagai ragam tantangan dalam penggunaannya.

Dalam penggunaan aplikasi sakti pada pelayanan bendahara satuan (BENSAT) Polres Barito Timur ditemukan beberapa fenomena permasalahan, di antaranya:

1. Kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) bagi operator SAKTI, karena dana lebih banyak dianggarkan atau dikeluarkan untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19 dibandingkan untuk pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) tentang penggunaan aplikasi SAKTI bagi operator BENSAT (Sumber: Polres Barito Timur Tahun 2023).

2. Sering terjadinya *maintenance* terhadap sistem aplikasi SAKTI yang berakibat pada pelayanan BENSAT (Sumber: Polres Barito Timur Tahun 2023).
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai alat pengoperasian aplikasi SAKTI (Sumber: Polres Barito Timur Tahun 2023).

Dari latar belakang di atas diuraikan bahwa bagaimana pentingnya sebuah sistem akuntansi berbasis aplikasi dalam pengelolaan keuangan negara. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SAKTI PADA PELAYANAN BENDAHARA SATUAN (BENSAT) POLRES BARITO TIMUR.**

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Barito Timur yang beralamatkan di Jl. A. Yani KM.6, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Kode Pos 73611.

Berkaitan dengan judul penelitian ini yang dimana untuk memberikan gambaran terkait Efektivitas Penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur, maka Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif Menurut (Ibrahim *et al.*, 2023) Tipe penelitian deskriptif adalah cara kerja yang sifatnya menggambarkan, melukiskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang diamati.

Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dari objek yang akan diteliti, data tersebut dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau data yang berfungsi sebagai pelengkap.

Sumber data yang peneliti gunakan yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan cara pengambilan sampel dengan menggunakan berbagai pertimbangan. Penelitian kualitatif sangat pas dengan jenis teknik sampling ini karena tidak memerlukan proses generalisasi.

Menurut (Rukajat, 2018) Desain Penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Teknik data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa aktivitas dalam model analisis data kualitatif mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur

a. Aspek Tugas dan Fungsi

1) Aturan dan Pelaksanaan Tugas

Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur telah mempunyai aturan dalam pengoperasiannya atau pelaporannya. Adapun aturan tersebut berupa penggunaan aplikasi SAKTI di setiap keluar-masuk dana yang ada di instansi Polri (Polres Barito Timur).

Aturan dan pelaksanaan tugas pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek tugas dan fungsi, yaitu lembaga dikatakan baik jika melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam aspek tugas dan fungsi, untuk mencapai kebaikan dalam penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur erat kaitannya dengan aturan pelaksanaan tugas, pembagian tugas, koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan disiplin petugas.

2) Pembagian Tugas

Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur telah mempunyai tugas dan

fungsi masing-masing. Dalam pembagian tugasnya dilakukan secara sepihak oleh atasan tanpa konfirmasi terlebih dahulu sebelum penetapan SK tugas kepada para anggota atau petugas yang baru.

Pembagian tugas kepada petugas pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan kurang efektif, karena penjelasan tersebut tidak sesuai dengan tata cara dalam pembagian tugas berdasarkan pendapat (Norsanti, 2021), pembagian tugas harus mencakup beberapa hal, seperti kemampuan petugas dalam mengerjakan tugas yang diberikan, kesediaan petugas terhadap tugas yang diberikan, pengetahuan petugas terhadap tugas yang diberikan, dan kesesuaian pendidikan petugas terhadap tugas yang diberikan.

3) Koordinasi

Petugas pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur tidak dikordinasikan oleh atasan tentang tugas yang diberikan, karena dalam pembagian tugasnya dilakukan secara sepihak oleh atasan tanpa koordinasi atau konfirmasi terlebih dahulu sebelum penetapan SK tugas kepada para anggota atau petugas yang baru. Selain itu juga, petugas jarang dikordinasikan atau dikonfirmasi tentang tugas yang dijalankan.

Kordinasi kepada petugas pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan tata cara dalam pembagian tugas berdasarkan pendapat Muasaroh dalam (Normalita, 2016) aspek tugas dan fungsi untuk mencapai penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur yang baik erat kaitannya dengan koordinasi terhadap para pegawai, baik dalam pembagian tugas ataupun melaksanakan tugas, karena baik kordinasinya, maka baik juga kinerja para pegawainya.

4) Disiplin Petugas

Petugas pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur telah mempunyai kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja. Datang selalu lebih awal dan pulang selalu lebih lama, begitu juga dengan pelaporan-pelaporan yang dilakukan melalui aplikasi SAKTI di setiap keluar-masuk dana yang ada di instansi Polri (Polres Barito Timur). Semuanya dilakukan atau dikerjakan dengan tepat dan sesuai standar operasional.

Disiplin petugas pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek disiplin petugas berdasarkan pendapat Muasaroh dalam (Normalita, 2016), bahwa disiplin petugas sangat menentukan berhasil dan tidaknya penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dalam datang dan pulang kerja, memulai dan mengakhiri pekerjaan, dan pelaporan hasil pekerjaan. Semuanya dilakukan dengan waktu yang tepat dan tidak dilanggar atau keluar dari waktu yang ditentukan. Semuanya telah sesuai dengan standar operasional dalam bertugas.

b. Aspek Rencana atau Program

1) Adanya Perencanaan

Perencanaan dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek adanya perencanaan berdasarkan pendapat (Latif and Irwan, 2019), karena perencanaan merupakan bagian terpenting dalam menjalankan tugas. Perencanaan juga bisa disebut sebagai alat ukur di dalam menentukan ketercapaian menjalankan tugas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dalam merencanakan sebuah anggaran semua pengoperasian di lingkungan Polres Barito Timur.

2) Perencanaan Target

Perencanaan target dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek adanya perencanaan target berdasarkan pendapat (Latif and Irwan, 2019), dalam perencanaan target merupakan bagian terpenting dalam menjalankan tugas. Perencanaan target juga bisa disebut sebagai alat ukur di dalam menentukan ketercapaian menjalankan tugas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dalam merencanakan target sebuah anggaran semua pengoperasian di lingkungan Polres Barito Timur.

c. Aspek Ketentuan dan Peraturan

1) Ketentuan terhadap Aturan

Ketentuan terhadap aturan dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek ketentuan terhadap aturan berdasarkan pendapat (Yosep *et al.*, 2020), yaitu aspek ketentuan terhadap aturan sangat penting terkhusus di dalam penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur. Ketentuan terhadap aturan erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pegawai, karena baik aturannya, maka baik juga kinerja para pegawainya dan hal tersebut juga harus didukung oleh kepatuhan para pegawai dalam melaksanakan tugas tersebut.

2) Kejelasan Aturan

Kejelasan aturan dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek kejelasan aturan berdasarkan pendapat (Octaviany, 2021), yaitu aspek kejelasan aturan sangat penting terkhusus di dalam penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur. Kejelasan aturan erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pegawai, karena jelas aturannya, maka baik juga kinerja para pegawainya dan hal tersebut juga harus didukung oleh kepatuhan para pegawai dalam melaksanakan tugas tersebut.

d. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

1) Target yang Dicapai

Target yang dicapai dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek target yang dicapai berdasarkan pendapat (Sudrajat, 2020), yaitu tercapainya target merupakan sebuah tujuan akhir dari terlaksananya tugas yang diberikan. Oleh karena itu, penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikatakan tercapai atau berhasil jika target yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Dalam pencapaiannya diperlukan kerjasama semua pihak, terkhusus Tim yang berperan (Bidang Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT)).

2) Kesesuaian

Kesesuaian dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek target yang dicapai berdasarkan pendapat (Susanty and Baskoro, 2012), yaitu tercapainya target merupakan sebuah tujuan akhir dari terlaksananya tugas yang diberikan. Oleh karena itu, penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikatakan tercapai atau berhasil jika target yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Dalam pencapaiannya diperlukan kerjasama semua pihak, terkhusus Tim yang berperan (Bidang Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT)).

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Proses Efektivitas Penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur

a. Tidak Adanya Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi Operator SAKTI

Tidak adanya Pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) pada Polres Barito Timur dikategorikan tidak efektif, karena penjelasan tersebut tidak sesuai dengan aspek pelatihan atau bimbingan teknis (BIMTEK) berdasarkan pendapat (Hasibuan, Saputra and Nurrahman, 2021), yaitu Pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) terhadap pekerjaan yang diampu merupakan penunjang kinerja para pegawai. Semakin sering mengikuti Pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) terhadap pekerjaan yang diampu, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh para pegawai (Mubarok, 2024). Hal tersebut juga penting dilakukan atau diikuti oleh para pengguna Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur, karena akan menunjang kinerjanya di dalam menjalankan tugas yang diberikan.

b. Gangguan Server Aplikasi SAKTI

Gangguan server Aplikasi SAKTI dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) pada Polres Barito Timur dikategorikan tidak efektif, karena penjelasan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan berikut, bahwa pembaharuan sistem Aplikasi SAKTI sering membuat *maintenance* pengoperasian Aplikasi SAKTI dan membuat terhambatnya para pegawai, khususnya operator yang melaporkan

atau yang menggunakan Aplikasi SAKTI tersebut. Keadaan tersebut membuat operator bekerja lebih giat lagi agar pelaporan tidak ada yang tertinggal atau terlambat.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Alat Pengoperasian Aplikasi SAKTI dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) pada Polres Barito Timur dikategorikan tidak efektif, karena penjelasan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan berikut, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Alat Pengoperasian Aplikasi SAKTI harus disesuaikan dengan pekerjaan yang diampu atau pekerjaan yang dibebankan oleh atasan kepadanya. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengoperasian Aplikasi SAKTI akan menghambat kinerja para pegawai. Pekerjaan akan banyak menumpuk dan tertumpuk dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerjakannya.

3. Faktor-Faktor yang Mendorong Proses Efektivitas Penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur

a. Aturan dan Pelaksanaan Tugas Efektif

Aturan dan pelaksanaan tugas pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat (Norsanti, 2021) efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek tugas dan fungsi, yaitu lembaga dikatakan baik jika melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam aspek tugas dan fungsi, untuk mencapai kebaikan dalam penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur erat kaitannya dengan aturan pelaksanaan tugas, pembagian tugas, koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan disiplin petugas.

b. Koordinasi Antara Petugas Efektif

Kordinasi kepada petugas pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan tata cara dalam pembagian tugas berdasarkan pendapat Muasaroh dalam (Normalita, 2016), aspek tugas dan fungsi untuk mencapai penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur yang baik erat kaitannya dengan kordinasi terhadap para pegawai, baik dalam pembagian tugas ataupun melaksanakan tugas, karena baik kordinasinya, maka baik juga kinerja para pegawainya.

c. Disiplin Petugas Efektif

Disiplin petugas pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek disiplin petugas berdasarkan pendapat (Hutajulu, Sintani and Meitiana, 2021), bahwa disiplin petugas sangat menentukan berhasil dan tidaknya penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dalam datang dan pulang kerja, memulai dan mengakhiri pekerjaan, dan pelaporan hasil pekerjaan. Semuanya dilakukan dengan waktu yang tepat dan tidak dilanggar atau keluar dari waktu yang ditentukan. Semuanya telah sesuai dengan standar operasional dalam bertugas.

d. Perencanaan Petugas Efektif

Perencanaan dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek adanya perencanaan berdasarkan pendapat (Lahagu, Ndraha and Halawa, 2023), karena perencanaan merupakan bagian terpenting dalam menjalankan tugas. Perencanaan juga bisa disebut sebagai alat ukur di dalam menentukan ketercapaian menjalankan tugas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dalam merencanakan sebuah anggaran semua pengoperasian di lingkungan Polres Barito Timur.

e. Perencanaan Target Efektif

Perencanaan target dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek adanya perencanaan target berdasarkan pendapat (Ramdhani and Anisa, 2017), dalam perencanaan target merupakan bagian terpenting dalam menjalankan tugas. Perencanaan target juga bisa disebut sebagai alat ukur di dalam

menentukan ketercapaian menjalankan tugas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dalam merencanakan target sebuah anggaran semua pengoperasian di lingkungan Polres Barito Timur.

f. Ketentuan terhadap Aturan Efektif

Ketentuan terhadap aturan dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek ketentuan terhadap aturan berdasarkan pendapat Muasaroh dalam (Normalita, 2016), yaitu aspek ketentuan terhadap aturan sangat penting terkhusus di dalam penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur. Ketentuan terhadap aturan erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pegawai, karena baik aturannya, maka baik juga kinerja para pegawainya dan hal tersebut juga harus didukung oleh kepatuhan para pegawai dalam melaksanakan tugas tersebut.

g. Kejelasan Aturan Efektif

Kejelasan aturan dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek kejelasan aturan berdasarkan pendapat (Hasriyanti, 2019), yaitu aspek kejelasan aturan sangat penting terkhusus di dalam penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur. Kejelasan aturan erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pegawai, karena jelas aturannya, maka baik juga kinerja para pegawainya dan hal tersebut juga harus didukung oleh kepatuhan para pegawai dalam melaksanakan tugas tersebut.

h. Target yang Dicapai Efektif

Target yang dicapai dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek target yang dicapai berdasarkan pendapat Muasaroh dalam (Normalita, 2016), yaitu tercapainya target merupakan sebuah tujuan akhir dari terlaksananya tugas yang diberikan. Oleh karena itu, penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikatakan tercapai atau berhasil jika target yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Dalam pencapaiannya diperlukan kerjasama semua pihak, terkhusus Tim yang berperan (Bidang Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT)).

i. Kesesuaian Ketentuan Pengoperasionalan Aplikasi SAKTI Efektif

Kesesuaian dalam Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikategorikan efektif, karena penjelasan tersebut sesuai dengan aspek target yang dicapai berdasarkan pendapat Muasaroh dalam (Normalita, 2016), yaitu tercapainya target merupakan sebuah tujuan akhir dari terlaksananya tugas yang diberikan. Oleh karena itu, penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur dikatakan tercapai atau berhasil jika target yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Dalam pencapaiannya diperlukan kerjasama semua pihak, terkhusus Tim yang berperan (Bidang Pelayanan Bendahara Satuan

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Efektivitas Penggunaan Aplikasi SAKTI pada Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) Polres Barito Timur telah efektif, yaitu dengan aspek pertama, Aspek Tugas dan Fungsi belum semuanya efektif, karena; a) Aturan dan pelaksanaan tugas kurang efektif. Pelayanan Bendahara Satuan (BENSAT) telah mempunyai aturan. b) Pembagian tugas kurang efektif. Pembagian tugas dilakukan secara sepihak. c) Koordinasi efektif. Petugas dikordinasikan oleh atasan tentang tugas. d) Disiplin petugas efektif. Petugas mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Kedua, Aspek rencana atau program efektif, karena; a) Adanya perencanaan efektif. Perencanaan anggaran sesuai dengan keadaan. b) Perencanaan target efektif. Rencana penarikan anggaran ditetapkan dengan melakukan pemetaan. Ketiga, Aspek ketentuan dan peraturan efektif, karena; a) Ketentuan terhadap aturan efektif. Ketentuan aturan penggunaan aplikasi SAKTI. b) Kejelasan aturan efektif. Kejelasan aturan penggunaan aplikasi SAKTI. Keempat, Aspek tujuan atau kondisi ideal semuanya efektif, karena; a) Target yang dicapai efektif. Penggunaan Aplikasi SAKTI telah tercapai. b) Kesesuaian efektif. Penggunaan Aplikasi SAKTI

telah sesuai dengan ketentuannya. 2) Faktor-Faktor yang menghambatnya, meliputi; a) Kurangnya Pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi Operator SAKTI. b) Sering terjadinya maintenance akibat pembaharuan sistem Aplikasi SAKTI dan membuat operator tidak bisa beroperasi. c) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai alat pengoperasian Aplikasi SAKTI. 3) Faktor-Faktor yang mendorongnya, meliputi; a) Aturan dan pelaksanaan tugas efektif. b) Koordinasi antara petugas efektif. c) Disiplin petugas efektif. d) Perencanaan petugas efektif. e) Perencanaan target efektif. f) Ketentuan terhadap aturan efektif. g) Kejelasan aturan efektif. h) Target yang dicapai efektif. i) Kesesuaian ketentuan pengoperasionalan Aplikasi SAKTI efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, S. (2012) 'Analisis efektivitas hukum dalam penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) Serta peranan lembaga pengawas terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah', *Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan* [Preprint].
- Fauziah, A., Manossoh, H. and Kindangen, W.D. (2023) 'Evaluasi Sistem Prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang Dan Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), pp. 573–583.
- Hasibuan, C.S., Saputra, R. and Nurrahman, A. (2021) 'Pengembangan Kompetensi Aparatur Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), pp. 221–238.
- Hasriyanti, H. (2019) 'Manajemen Pelayanan Pegawai Terhadap Masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare'. IAIN Parepare.
- Hutajulu, Y.M.M., Sintani, L. and Meitiana, M. (2021) 'Pengaruh disiplin dan budaya kerja terhadap kinerja ASN melalui motivasi kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah', *Journal of environment and Management*, 2(1), pp. 44–52.
- Ibrahim, M.B. *et al.* (2023) *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lahagu, P., Ndraha, A.B. and Halawa, O. (2023) 'Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Perencanaan Karir Pegawai Dengan Motivasi Karir Sebagai Variabel Mediasi Pada Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), pp. 1–18.
- Latif, A. and Irwan, A.M. (2019) 'Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan', *Journal Homepage*, 5(2).
- Lestari, N.N.S.A., Bagia, I.W. and Jana, G.P.A.S. (2018) 'Pengaruh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota', *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), pp. 24–33.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2016) 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK. 09/2016 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan'.
- Mubarok, R. (2021) 'Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam', *Al-fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), pp. 131–146. Available at: <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>.
- Mubarok, R. (2024) 'Strategi Pengembangan Manajemen Diklat dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Pendidikan', *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 2(2), pp. 127–138.

- Mubarok, R. and Hidayah, N.F. (2024) 'Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Pendidikan Madrasah Swasta', *Journal in Teaching and Education Area*, 1(1), pp. 39–53.
- Muhammad Hidayatullah, G. (2021) 'Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 14(3), pp. 213–223. Available at: <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7384>.
- Nikita, N. (2016) 'Sistem Dan Prosedur Akuntansi Belanja Langsung Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Noorrahman, M.F., Rizal, M. and Sairin, M. (2022) 'Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kinerja dalam Aspek Kepuasan Kerja pada Pejabat Struktural Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(1), pp. 155–163.
- Normalita (2016) *Efektivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Norsanti, N. (2021) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar)', *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), pp. 10–21.
- Octaviany, A.R. (2021) 'Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan'. Universitas Brawijaya.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara', *Jakarta (ID): Sekretariat Negara* [Preprint].
- Prajanto, A. and Pratiwi, R.D. (2019) 'Revolusi Industri 4.0: Desain Perkembangan Transaksi dan Sistem Akuntansi Keuangan', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)*, 10(1), pp. 86–96.
- Ramdhani, D. and Anisa, I.Z. (2017) 'Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten', *Jurnal riset akuntansi terpadu*, 10(1).
- Rukajat, A. (2018) *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Said, A.L. (2018) *Corporate Social Responsibility dalam perspektif governance*. Deepublish.
- Sudrajat, D. (2020) 'Dampak Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya', *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(3).
- Sugiyono (2016) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanty, A. and Baskoro, S.W. (2012) 'Pengaruh motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja serta dampaknya pada kinerja karyawan (studi kasus pada pt. Pln (persero) apd semarang)', *J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 7(2), pp. 77–84.
- Urahmah, N. and Andri, A. (2023) 'KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI UNIT KERJA IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3233–3241.
- Yosep, M. et al. (2020) *Kualitas penerapan sistem informasi akuntansi manajemen pada entitas sektor publik*. Scopindo Media Pustaka.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang *Pelaksanaan Piloting Sistem*



Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.05/2018 tentang *Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.*